



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pelaporan kinerja sebagai salah satu bagian dari SAKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kegiatan, seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang ada. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam :

- ❖ Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek.

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\%$$

- ❖ Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

$$\frac{TARGET - (REALISASI - TARGET)}{TARGET} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata-rata. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut:

Nilai dibawah 55	:	kurang
Nilai > 55 s/d 80	:	cukup
Nilai >80 s/d 95	:	baik
Nilai > 95 s/d 100	:	sangat baik

Capaian Kinerja Sasaran yang akan diuraikan mengukur sasaran yang terdiri dari Penetapan angka kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian Kinerja Sasaran yang akan diuraikan dalam bab III ini mengukur sasaran yang dan indikator yang ada dalam Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2014. Adapun ringkasan evaluasi capaian kinerja dari sasaran sebagaimana berikut :

Tabel 3.1
Skala Penilaian Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2014

No	SKALA PENILAIAN	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA
1	Sangat Baik	84	362
2	Baik	11	31
3	Cukup	8	30
4	Kurang	1	21

Dengan perincian pada masing-masing misi sebagai berikut

1. Misi pertama dengan 8 sasaran dan 47 indikator kinerja. Sejumlah 40 indikator kinerja bernilai sangat baik; 3 indikator kinerja bernilai baik; 2 indikator kinerja bernilai cukup, dan 1 indikator kinerja bernilai kurang, dengan 1 indikator kinerja yang belum bisa diukur
2. Kinerja misi kedua dengan 21 sasaran dan 55 indikator kinerja. Sejumlah 45 indikator kinerja bernilai sangat baik; 2 indikator kinerja bernilai baik; 7 indikator kinerja bernilai cukup, dan 1 indikator kinerja bernilai kurang.
3. Kinerja misi ketiga dengan 25 sasaran dan 53 indikator kinerja. Sejumlah 41 indikator kinerja bernilai sangat baik; 2 indikator kinerja bernilai baik; 7 indikator kinerja bernilai cukup, dan 3 indikator kinerja bernilai kurang.
4. Kinerja misi keempat dengan 19 sasaran dan 100 indikator kinerja. Sejumlah 84 indikator kinerja bernilai sangat baik; 6 indikator kinerja bernilai baik, 5 indikator kinerja bernilai cukup, dan 5 indikator kinerja bernilai kurang.
5. Kinerja misi kelima dengan 24 sasaran dan 173 indikator kinerja. Sejumlah 140 indikator kinerja bernilai sangat baik; 16 indikator kinerja bernilai baik; 6 indikator kinerja bernilai cukup, dan 11 indikator kinerja bernilai kurang.
6. Kinerja misi keenam dengan 8 sasaran dan 17 indikator kinerja. Sejumlah 12 indikator kinerja bernilai sangat baik; 2 indikator kinerja bernilai baik; 3 indikator kinerja bernilai cukup.

Capaian Kinerja Sasaran merupakan capaian dari Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2014, yang di dalamnya termuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan lain yang dipandang penting untuk dimuat dalam dokumen Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2014. Adapun evaluasi dan analisis sebagaimana uraian berikut ini :

Misi Pertama: Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas dan responsifitas aparatur yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan.

1. Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang profesional menuju pelayanan publik yang prima.

a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang profesional menuju pelayanan publik yang prima. Dengan capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tshun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Rasio pemenuhan sarana prasarana perkantoran	85%	95%	95%	95%	100%	100%
2	Penerapan e-Government yang diukur :						
	- e-Procurement (LPSE)	44%	100%	90%	100%	111%	100%
	- Jumlah SKPD yang menggunakan Sistem Informasi	18 SKPD	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD	100%	46 SKPD
	- Jumlah SKPD yang memiliki website	6 SKPD	21 SKPD	46 SKPD	22 SKPD	48%	46 SKPD
	- WAN (Wide Area Network) setiap SKPD	10%	20%	60%	37%	62%	75%
	- Penggunaan software legal/ OSS di setiap SKPD	40%	20%	100%	25%	25%	100%
3	Tersedianya dokumen data/ informasi/ statistik daerah:						
	- Buku Daerah dalam Angka	ada	ada	ada	ada	100%	Ada
	- Buku PDRB Kota	ada	ada	ada	ada	100%	Ada
4	Tersedianya data base informasi kearsipan	ada	ada	ada	ada	100%	Ada
5	Persentase SKPD yang melaksanakan arsip baku	55%	55%	60%	65%	108%	100%
6	Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	60%	100%	80%	80%	100%	100%
7	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	50%	100%	70%	70%	100%	85%
Rata-rata capaian kinerja sasaran						87.86%	

b. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

1) Pada indikator rasio pemenuhan sarana prasarana perkantoran sudah terpenuhi, karena telah dilaksanakan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang disesuaikan dengan beban kerja/kebutuhan yang harus disampaikan pada Rencana Kebutuhan Belanja Modal pada tahun sebelumnya dan telah dilaksanakan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada tahun bersangkutan.

- 2) Pada tahun anggaran 2014 seluruh paket pelelangan telah melalui e-Procurement, kinerja tersebut dihasilkan dari upaya memenuhi target ketentuan dalam peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. Sistem Informasi yang digunakan seluruh SKPD di Kota Magelang adalah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA). WAN Kota Magelang pada tahun 2013 telah menggabungkan Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam satu kontak. Pada tahun 2014 sudah teralokasikan tetapi karena penganggaran tidak mencukupi untuk pelaksanaan sehingga tidak dapat dilaksanakan di tahun 2014. Untuk indikator Jumlah SKPD yang memiliki website dari target 46 SKPD yang ditetapkan di Tahun 2014, baru tercapai 22 SKPD.
 - 3) Dokumen informasi statistik yang disusun adalah Buku Daerah dalam Angka dan Buku PDRB Kota, sekaligus juga terdapat data-data profil lainnya seperti profil pendidikan, kesehatan, pariwisata, pemuda, kependudukan, penanaman modal dan lain-lain.
 - 4) Mulai tahun 2013 telah menerapkan SIMARDI (Sistem Informasi Arsip Dinamis) sebagai database sistem informasi kearsipan;
 - 5) Telah dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan kepada seluruh pengelola kearsipan di SKPD dan
 - 6) Telah dilakukan penataan arsip langsung ke SKPD.
 - 7) Sarana dan prasarana kearsipan, yang dipelihara antara lain berupa pemeliharaan rolling opact, filling kabinet, dos arsip, cardex, rak arsip, lemari arsip, meja pengolahan, kartu kendali, folder, AC dan pemadam kebakaran.
- c. Hambatan dan permasalahan antara lain :
- 1) Pada tahun 2014 sudah teralokasikan WAN tetapi karena penganggaran tidak mencukupi untuk pelaksanaan sehingga tidak dapat dilaksanakan di tahun 2014.
 - 2) Untuk indikator Jumlah SKPD yang memiliki website dari target 46 SKPD yang ditetapkan di Tahun 2014, baru tercapai 22 SKPD, hal ini terkendala pada kemampuan SDM SKPD dalam mengelola Website dan koneksi internet antar SKPD.
- d. Solusikedepan diharapkan ada bantuan penyertaan ataupun pelatihan dari Dishubkominfo, tentang membangun dan mengelola Website.
- Realisasi danayang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 78.624.452.916,00 dari anggaran sebesar Rp. 94.673.770.705,00. Apabila presentasi realisasi anggaran sebesar 82,96% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 87,83% maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungjawab dan akuntabel

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungjawab dan akuntabel dengan capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Hasil Opini BPK untuk Laporan Keuangan	WDP	WDP	WDP	-	100%	WTP
2	Tingkat Ketertiban Administasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan	89.50%	88.77%	85%	103%	121%	85%
3	Tingkat temuan pemeriksaan	80.84%	82.39%	85%	82%	96%	80%
4	Tingkat capaian kinerja pemerintah kota:						
	LAKIP	Sangat baik	Sangat baik	sangat baik	sangat baik	100%	sangat baik
	LPPD	Tepat waktu	Tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	100%	tepat waktu
	LKPJ	Tepat waktu	Tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	100%	tepat waktu
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	memuaskan	memuaskan	100%	memuaskan
6	Tingkat perbaikan terhadap semua obrik	-	81.25%	68%	87%	128%	80%
7	Persentase kesesuaian tingkat pendidikan dengan jabatan struktural	83.10%	86.73%	83%	82,10%	101%	83%
Rata-rata capaian kinerja sasaran						105.77%	

- b. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut,dengan uraian sebagai :

1) Hasil Pemeriksaan Badan Perwakilan Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 belum diketahui karena masih dalam pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 Badan Perwakilan Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jawa Tengah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPD Kota Magelang adalah :

- a) Inventarisasi Aset
- b) Aset masih menjadi permasalahan antara lain karena dalam pengelolaan asset belum menggunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) sehingga penyajian nilai asset masih belum akurat, dan kualitas SDM bagi pengurus barang & penyimpan barang perlu ditingkatkan dalam penggunaan Teknologi Informasi.
- c) Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
- d) Investasi Dana non permanen khususnya dana bergulir
- e) Piutang

Dari hasil WDP Tahun 2013 maka Pemerintah Kota Magelang pada Tahun 2014 telah melakukan upaya-upaya guna adanya peningkatan hasil penilaian LKPD TA. 2014 menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain yaitu :

- a) Penertiban terhadap aset daerah salah satunya dengan menindaklanjuti sensus barang daerah terutama pada aset daerah yang nilainya tersaji dalam neraca namun fisiknya tidak ada sehingga dilakukan penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Magelang dari Daftar Milik Daerah dan Neraca Daerah Tahun 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 028.1/12/112 Tahun 2014 tgl 31 Desember 2014.
 - b) Melakukan inventarisasi dana bergulir (jumlah dana, waktu bergulir, data penerimaan, dan lain-lain) dan pengkategorian dana bergulir jatuh tempo disesuaikan dengan bultek 07 tentang akuntansi dana bergulir yang dibagi dalam 3 kategori yaitu : tidak dapat ditagih, diragukan untuk ditagih, dan dapat ditagih, untuk selanjutnya dapat dituangkan dalam peraturan walikota tentang kebijakan akuntansi.
 - c) Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan dana bergulir bagi koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.
- 2) Pada tahun 2014 realisasi indikator sasaran Tingkat ketertiban administrasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan mencapai 103 % melebihi dari target 85 % dengan capaian kinerja sebesar 121 %, bila dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerjanya 105.30% dan tahun 2013 capaian kinerja 104.44 % dengan 7 kegiatan, maka terjadi kenaikan capaian kinerja pada tahun 2014 yang diwujudkan dalam 9 kegiatan dengan data sebagai berikut :
- a) Penyusunan laporan pengawasan mencapai kinerja 100 % dengan direalisasikannya 2 buah laporan pada setiap semester.
 - b) Pemutakhiran data hasil pengawasan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah mencapai kinerja 100% dengan terealisasinya 4 (empat) kali Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah yang dilaksanakan setiap triwulan.
 - c) Pemaparan Hasil Pengawasan mencapai target 100% dengan diadakannya Gelar pengawasan pada bulan Juli.
 - d) Penilaian SKPD melalui evaluasi LAKIP oleh Inspektorat Kota Magelang berdasarkan perintah tugas melaksanakan 14 SKPD dari target yang 5 SKPD.
 - e) Pemanfaatan saran untuk perbaikan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 50 % menjadi 75 % hal ini dikarenakan adanya pendampingan oleh BPKP Perwakilan DI Yogyakarta pada saat APIP melakukan revidi laporan keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013, sehingga pemanfaatan saran dari Inspektorat Kota Magelang terhadap LKPD Tahun 2013 digunakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
 - f) Penelitian dan penilaian laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) mencapai kinerja 96,41% dikarenakan realisasi laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) yang masuk berjumlah 2974 PNS Golongan III a ke atas dari target sebesar 3200 PNS.
 - g) Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) merupakan kegiatan yang baru ada pada Tahun 2014 guna memantau Pejabat Eselon II di Lingkup Pemerintah Kota Magelang dalam melaporkan

harta kekayaan penyelenggaraan daerah berdasarkan SK Walikota Magelang Tahun 2014 tentang Penetapan penyelenggaraan negarayang wajib melaporkan kekayaan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang tahun 2014 dengan capaian kinerja 100% yakni terealisasi 2 buah laporan pada setiap semester.

- h) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) juga merupakan kegiatan yang baru ada pada saat perubahan DPA Tahun 2014 dan pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV, sehingga tidak maksimal dalam pelaksanaan kegiatannya dengan Capaian kinerja 33,33% berupa hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi online (PMPRB-online) dimana inspektorat dalam melakukan penilaian belum secara online namun dengan memberikan Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi kepada SKPD terkait untuk diisi kemudian dilakukan penilaian.
 - i) Percepatan pemberantasan korupsi pelaksanaan nomor 5 tahun 2004 mencapai kinerja 50% dikarenakan hanya terealisasinya 1 buah Laporan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di akhir tahun.
- 3) Indikator sasaran Tingkat temuan pemeriksaan mencapai realisasi 82% lebih rendah dari target 85 % dan hamper sama dengan realisasi Tahun 2013 berkisar 82.39% dari target 83% dan lebih tinggi dari capaian realisasi tahun 2012 sebesar 80,84%. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD/Entitas selaku Obyek Pemeriksaan (Obrik) memiliki keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kota Magelang maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- Perolehan indikator temuan pemeriksaan di dapat data dari rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yaitu:
- a) Inspektorat Kota Magelang Tahun 2014 dengan jumlah rekomendasi 382 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 373 sehingga capaian kinerja 97.64 %. Sedangkan untuk temuan Inspektorat Kota Magelang yang pending sudah semua ditindaklanjuti.
 - b) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dengan jumlah rekomendasi 11 dan telah ditindaklanjuti 7 sehingga capaian kinerjanya 63.64 %
 - c) BPK RI untuk rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari pending tahun 2003 sampai dengan 2014 berjumlah 511 dan yang telah ditindaklanjuti sampai dengan Hasil Pemutakhiran Data Semester II Tahun 2014 berjumlah 432 rekomendasi sehingga capaian kinerja 84.54%.
- Hasil tindak lanjut di atas dilakukan penilaian rata-rata dan di dapat capaian kinerja sebesar 96% dengan kategori sangat baik Walaupun sangat baik masih terdapat kendala dalam hal tindak lanjut oleh temuan APIP maupun BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah antara lain :
- Adanya PNS yang bertanggungjawab/pelaku atas kerugian daerah/negara telah pindah tugas, pensiun ataupun meninggal
 - Perusahaan / pihak ketiga yang bertanggung jawab atas temuan/tidak kooperatif, pindah ke daerah lain, tidak dapat diketahui keberadaannya.
- 4) Indikator sasaran Tingkat perbaikan terhadap semua obyek pemeriksaan (obrik) mencapai realisasi 87 % lebih tinggi dari target 68 % dengan capaian kinerja

sebesar 128%, hal ini menunjukkan kategori sangat baik, Perolehan indikator Tingkat perbaikan terhadap semua obyek pemeriksaan (obrik) Tahun 2014 diwujudkan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu

- a) Pembinaan terhadap obyek pemeriksaan melalui pengawasan internal secara berkala mencapai kinerja 54.38 % yaitu target pembinaan sebanyak 160 obrik hanya terealisasi 87 obrik lebih rendah dari tahun 2013 yang mencapai 100 obrik, hal ini dikarenakan APIP dilibatkan dalam *consulting partner* guna ikut menunjang Laporan Keuangan menuju penilaian WTP dan APIP bersama DPPKD serta bagian perlengkapan menindaklanjuti sensus barang terutama kartu kuning yaitu aset yang tersaji dalam neraca namun fisik aset tidak ada serta adanya penambahan pemeriksaan khusus yaitu APIP melaksanakan pendalaman atas rekomendasi BPK RI Provinsi Jawa Tengah.
- b) Pembinaan PNS melalui penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah mencapai kinerja 120 % dengan terselesaikannya 24 kasus pengaduan lebih tinggi dari tahun sebelumnya 100% dikarenakan APIP mendapatkan tugas tambahan berupa pemeriksaan khusus yaitu melaksanakan pendalaman pemeriksaan atas rekomendasi BPK RI Provinsi Jawa Tengah.

5) Tingkat capaian kinerja pemerintah kotadiperoleh dari pengukuran kinerja dalam:

- a) LAKIP : sangat baik
- b) LPPD : tepat waktu
- c) LKPJ : tepat waktu

6) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat bekerjasama dengan para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang yang berperan sebagai tenaga surveyor langsung ke 40 unit pelayanan publik. Hasil survey tersebut memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja pelayanan publik dimana masyarakat dapat turut berperan dan berinteraksi guna memberikan kritik/saran perbaikan dalam rangka perbaikan pelayanan di unit pelayanan publik.

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2014 diperoleh nilai rata-rata **74,17** atau terkategori B (Baik). Nilai tersebut jika dibandingkan dengan rata-rata nilai IKM tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,601 Apabila dirinci sebanyak 39 UPP bernilai B “baik” atau memiliki nilai interval antara 62,51 – 81,25, sedangkan 1 unit pelayanan publik memiliki mutu pelayanan A “sangat baik” yaitu Kelurahan Magelang. Jumlah unit pelayanan publik yang menjadi obyek survey juga mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang sejumlah **35 unit**.

7) Hasil realisasi indikator prosentase kesesuaian tingkat pendidikan dengan jabatan struktural tahun 2014 sebesar 82,10% dari target 83% sehingga menunjukkan capaian kinerja 99% dengan data sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Data Kesesuaian Tingkat Pendidikan dengan Jabatan Struktural Tahun 2014

No	Eselon	Kesesuaian		Jumlah
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	II A	1		1
2.	II B	26		26
3.	III A	43	2	45
4.	III B	64	1	65
5.	IV A	266	30	296
6.	IV B	55	70	125
7.	V A	18		18
	JUMLAH	473	103	576
				82,10%

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa 82,10% atau 473 pejabat structural yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Magelang mempunyai latar pendidikan formal yang telah sesuai dengan bidang tugasnya, sedangkan 103 pejabat struktural tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya yang dilaksanakan dengan syarat jabatan dengan menganalisis jabatan, dimana pejabat dimaksud mempunyai kemampuan lebih dalam bidang yang dijabatnya sehingga adanya kebijakan untuk menduduki jabatan struktural tersebut.

Perlakuan aparatur yang mencerminkan nilai-nilai *good governance* (adil transparan, penegakkan hukum, menghormati HAM) dalam memberikan pelayanan publik

Realisasi yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 2.634.156.999,00 dari anggaran sebesar Rp. 3.522.132.000,00. Apabila presentasi realisasi anggaran sebesar 74,78% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 105,11% maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

3. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adil

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan dan adil dengan capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur bidang perizinan dan pelayanan umum	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%
2	Penyelesaian aduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%
3	Tingkat kompetensi aparatur	90,00%	91%	91%	83,18%	100%	90%
4	Rasio bayi berakte kelahiran	92,37%	68,24%	100%	94,18%	94,18%	100%
5	Rasio pasangan berakte nikah	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%
6	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	100%-[88,88%	100%	90,04%	90,04%	100%
7	Kepemilikan KTP	100%	88,88%	100%	90,04%	90,04%	100%

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
8	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (menyusul)	838	860	813	870	107,01%	77,91
9	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	ada	ada	ada	ada	100,00%	Ada
10	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	71,80%	100%	2,62%	2,62%	10,42%
11	Cakupan penerbitan Kartu Kelurga	---	27,15%	100%	29,11%	29,11%	29%
12	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	92,37%	153%	100%	164,62%	164,62%	33,33%
13	Cakupan penerbitan kutipan akte kematian	---	50,36%	23%	32,91%	143,09%	25%
Rata-rata capaian kinerja sasaran						93.90%	

b. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai :

- 1) SOP yang sudah dimiliki selain jenis-jenis perizinan dan pelayanan yang besar dan mencakup banyak pihak seperti:
 Dalam bentuk Peraturan Walikota:
 - a) Perizinan yang melalui BP2T
 - b) Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan
- 2) Pelayanan di masing-masing UPP yang telah diatur dalam Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan masing-masing kepala UPP.
 Indikator dalam prosen (%) tersebut diterjemahkan sebagai tersedia atau tidaktersedia. Secara keseluruhan prosedur sudah ada dan jelas, meskipun sebagian belum didukung dokumen legalitas (payung hukum) yang seharusnya dibuat.
- 3) Unit-unit pelayanan publik telah memiliki mekanisme penanganan pengaduan, meskipun tidak semuanya membentuk unit khusus. Unit khusus yang terbentuk diantaranya ada di BP2T dan RSUD Tidar.
- 4) Persentase tingkat kompetensi diperoleh dari perbandingan antara jumlah pegawai yang menduduki jabatan sesuai dengan latar belakang pendidikannya, dibandingkan dengan jumlah jabatan struktural yang tersedia.
 Indikator sasaran Tingkat Kapasitas kompetensi diwujudkan dalam peningkatan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap aparat salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Tahun 2014 jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Tahun 2014

No	Jenis Diklat	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Prosentase (Target/Realisasi)
1	Diklat teknis	354	489	275	323	117,45%
2	Diklat penjenjangan struktural	24	42	58	36	62,07%
3	Diklat fungsional	25	25	3	3	100%
	JUMLAH	403	536	26	31	119,3%

Sumber : BKD Tahun 2014

Indikator tingkat kompetensi aparatur pada BKD Kota Magelang diwujudkan dengan 3 (tiga) program yaitu program pendidikan, program peningkatan kapasitas, program pembinaan dan pengembangan aparatur. Dengan realisaai 100% sehingga capaian kinerja 100% walaupun 100% upaya peningkatan kompetensi aparatur hingga saat ini baru diukur dengan kesesuaian latar belakang pendidikan dengan syarat jabatan yang ada dalam analisis jabatan. Solusi untuk kedepan kiranya perlu disusun standar kompetensi managerial dan standar kompetensi teknis untuk semua jabatan, baik jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu maupun jabatan fungsional umum serta perlu dilakukan penilaian kemampuan dan kepribadian diri terhadap para pejabat oleh tim assessor.

Walaupun upaya peningkatan kompetensi dilaksanakan dalam berbagai bentuk dan jenis, namun tingkat kompetensi aparatur hingga saat ini baru diukur dengan kesesuaian latar belakang pendidikan dengan syarat jabatan yang ada dalam analisis jabatan. Kedepan kiranya perlu disusun standar kompetensi yang lebih rigid lagi dalam bentuk standar kompetensi managerial dan standar kompetensi teknis untuk semua jabatan, baik jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, maupun jabatan fungsional umum.

- 5) Pada tahun 2014 dalam pembuatan akta kelahiran mengalami peningkatan capaian kinerja yakni 94.18% dari capaian kinerja tahun 2013 sebesar 68%, hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Magelang dalam mengamatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk tidak memungut biaya (gratis) dalam kepengurusan akta kelahiran sampai masa 60 hari sejak bayi tersebut lahir dan adanya asas peristiwa kelahiran ditahun bersangkutan. Selanjutnya terkait dengan kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (menyusul) hasil realisasi sebesar 870 dari target 813 dengan capaian kinerja 107.01%, dikarenakan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran sudah cukup tinggi dan data untuk Tahun 2014 jumlah seluruh bayi yang lahir di Kota Magelang didapat dari Dinas Kesehatan Kota Magelang. Selanjutnya untuk indikator cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran mencapai kinerja sebesar 164% lebih tinggi dari Tahun 2013 sebesar 153% artinya pelayanan terhadap kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Magelang telah melampaui target baik kepada penduduk yang baru lahir maupun kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- 6) Rasio pasangan berakate nikah dihitung berdasarkan jumlah yang nikah yang dicatatkan di catatan sipil. Pada Tahun 2014 sebanyak 115 pasangan non muslim yang menikah dan telah dicatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 7) Capaian kinerja untuk indikator Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk sebesar 90.10% dari target 100% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 sebesar 89% .Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya mengurus Kartu Tanda Penduduk. Selanjutnya untuk indikator Kepemilikan KTP capaian kinerja sebesar 90.10% dari mendapatkan KTP-el serta adanya kerjasama dengan kelurahan untuk mendata penduduk yang baru

pindah atau tugas diluar kota agar segera mengurus Kartu Tanda Penduduk, sehingga ini menyebabkan adanya peningkatan kepemilikan KTP.

- 8) Untuk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK capaian kinerjanya sebesar 100% hal ini menunjukkan bahwa pada Kota Magelang telah ada KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yaitu KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya untuk indikator cakupan penerbitan KTP dengan capaian kinerjanya 76.11 lebih tinggi dari capaian kinerja Tahun 2013 sebesar 72%, hal ini menunjukkan sebagian penduduk pada Kota Magelang telah memiliki KTP-el sebesar 76.11%, namun masih ada pula yang belum memiliki KTP-el dikarenakan KTP lama masih berlaku sehingga belum pengurusan, dan tahun 2014 pengadaan blanko KTP-el terbatas.
- 9) Capaian Kinerja untuk Indikator Cakupan penerbitan Kartu keluarga sebesar 29.11% lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2013 sebesar 27%. Walaupun dengan capaian kinerja 27% bukan berarti banyak yang belum memiliki Kartu Keluarga karena berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa masyarakat Kota Magelang pada umumnya telah memiliki Kartu Keluarga. Indikator ini lebih menjelaskan bahwa pada Tahun 2014 Penerbitan Kartu Keluarga yang diterbitkan, lebih banyak pada penerbitan kartu keluarga yang disebabkan adanya perubahan data misalnya yakni adanya kelahiran anak, adanya perpisahan suami-isteri, adanya perpindahan, kartu keluarga hilang, dan lain sebagainya
- 10) Realisasi angka cakupan penerbitan kutipan angka kematian sebesar 32.91% lebih tinggi dari target 23.00% dengan capaian kinerja 143.09% lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 219%, namun tetap berkategori sangat baik. Hal ini sangat ditunjang dengan adanya kebijakan pemberian santunan kematian oleh Pemerintah Kota Magelang dan untuk pengurusan warisan oleh ahli waris.

c. Permasalahandan hambatan :

- 1) Pendataan kependudukan yang akurat menjadi faktor yang krusial dalam penentuan sasaran program pembangunan daerah, pengambilan kebijakan, maupun dalam penentuan proyeksi dan prediksi ke depan di ranah perencanaan pembangunan daerah.

d. Solusi :

- 1) adanya upaya keras pelayanan kepada masyarakat dan lebih dioptimalkan lagi baik dalam konteks peningkatan profesionalisme SDM-nya maupun sarana prasarana yang diperlukan.
- 2) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil dalam kerangka optimalisasi penataan admistrasi kependudukan adalah disamping secara internal peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan, juga secara eksternal meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan.
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan dalam penerbitan akte kelahiran, khususnya bagi anak-anak yang menjadi salah satu indikator penting dalam kerangka mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Magelang.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 1.020.069.425,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.136.343.000,00. Apabila presentasi realisasi anggaran sebesar 89,77% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 93,90% maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

4. Perlakuan aparatur yang mencerminkan nilai-nilai *good governance* (adil, transparan, penegakan hukum, menghormati ham) dalam memberikan pelayanan publik

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran perlakuan aparatur yang mencerminkan nilai-nilai *good governance* (adil, transparan, penegakan hukum, menghormati ham) dalam memberikan pelayanan publik dengan capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1.	Tingkat Pelanggaran Etika aparat yang mencakup :						
	Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin	0,66%	0,14%	4,74%	0,024%	199,49%	2%
	Persentase Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 Tahun	98,26%	95,02%	95,80%	93,46%	97,56%	96%
	Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	10	7	4 orang	4 orang	100%	15 orang
Rata-rata capaian kinerja sasaran						132.35%	

- b. Indikator sasaran tingkat pelanggaran etika aparat yang mencakup :
- 1) Indikator presentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin menggunakan rumus indikator bermakna negatif yang berarti semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya. Namun pelanggaran disiplin oleh BKD masih berupa penanganan kasus pelanggaran sedang dan berat yang dilaporkan kepada walikota melalui BKD Kota Magelang saja. Untuk tahun 2014 terdapat 4 kasus yang dilaporkan dan dari keempat kasus tersebut 1 kasus telah mendapat Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin. Capaian kinerja tahun 2014 indikator presentase PNS yang mendapat hukuman disiplin sebesar 199,5% naik dibandingkan capaian kinerja tahun 2013 sebesar 190%. Namun demikian bukan berarti tingkat pelanggaran disiplin di lingkungan Pemerintah Kota Magelang sangat rendah.
 - 2) Realisasi indikator presentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun mencapai 97,56% lebih rendah dari capaian kinerja tahun 2013 sebesar 99,50% dan tahun 2012 sebesar 103,16%, namun masih berkategori sangat baik. Untuk tahun 2014 data realisasi tingkat kehadiran PNS didapatkan dari laporan setiap bulan oleh masing-masing SKPD kepada BKD berupa hasil mesin absensi fingerprint dan dikombinasikan dengan absensi manual, sehingga diharapkan pendataan absensi lebih akurat, karena PNS tidak dapat menitip absen. Pemberlakuan absensi berlaku pada jam masuk kerja jam 07.00 WIB dan sore hari menjelang jam pulang kantor 15.30 WIB, sehingga masih terdapat kelemahan dalam jeda waktu tersebut, beberapa diantara PNS masih menggunakan waktu tidak untuk kepentingan dinas. Hal ini masih merupakan

permasalahan yang membutuhkan penyelesaian. Solusinya yaitu peningkatan kesadaran PNS melalui pembinaan mental dan penguatan fungsi pengawasan melekat pada atasan langsung perlu dilaksanakan. Disiplin PNS penting ditegakkan untuk meningkatkan kewibawaan PNS di mata masyarakat dan untuk mewujudkan *good governance*.

- 3) Realisasi indikator penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS 4 orang dari target 4 orang yang mengalami pelanggaran disiplin dengan capaian kinerja 100% hal ini lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja tahun 2012 dan 2013 yakni sebesar 150% dan 165%, diakrenakan target tahun 2012 dan 2013 lebih besar yaitu 20 orang sedangkan tahun 2014 targetnya semakin kecil karena diharapkan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin semakin sedikit. Indikator ini masih berkaitan dengan indikator presentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin. Indikator ini menggambarkan proses lanjutan dari kasus pelanggaran disiplin yang dilaporkan SKPD dan ditelisik , ditangani dan diproses dalam SK penjatuhan hukuman disiplin. Capaian Indikator penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS untuk tahun 2014 dapat tercapai 100%. Indikator ini merupakan proses lanjutan dari kasus pelanggaran disiplin PNS yang dilaporkan oleh SKPD yang kemudian ditelisik, ditangani dan diproses dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) penjatuhan hukuman disiplin.

c. Permasalahandan hambatan :

- 1) Peningkatan disiplin hendaknya diiringi dengan peningkatan budaya kerja.
- 2) Penilaian disiplin/kinerja pegawai juga harus mempertimbangkan tugas-tugas lain yang diberikan di luar jam kerja dan atau beban kerjanya.

d. Solusi :

Solusi kedepan agar ada mekanisme pengumpulan data pelanggaran disiplin pada masing-masing SKPD guna menggambarkan tingkat kedisiplinan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang secara keseluruhan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 77.882.175,00 dari anggaran sebesar Rp. 80.676.000,00. Apabila presentasi realisasi anggaran sebesar 96,54% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 132,35% maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

5. Terwujudnya peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Fisik Prasarana yang berkualitas (update dan valid)	7 dok	14 dok	6	14	233,33%	6
2	Tingkat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, tepat waktu dan tepat asas.	100%	100%	100%	100%	100%	-
3	Jumlah Penelitian/kajian sebagai bahan masukan kebijakan	---	3 dok	4	7	175%	-
4	Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	---	ada	ada	ada	100%	ada
5	Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	---	ada	ada	ada	100%	ada
6	Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota	ada	ada	ada	ada	100%	ada
7	Tingkat Konsistensi Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	90%	100%	90%	90%	100%	90%
8	Program dalam BA Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD	100%	90%	90%	90%	100%	-
9	Pelaksanaan Musrenbang	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	100%	-
10	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah	80%	82%	80%	90%	112,50%	-
Rata-rata capaian kinerja sasaran						120.08%	

b. Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu mekanisme perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian yang memadai. Perencanaan daerah yang berkualitas merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah dengan pengendalian dan pengawasan dari seluruh stakeholders. Dari sepuluh indikator deskripsi dan analisa capaiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Indikator pertama Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta fisik Prasarana yang berkualitas (update dan valid). Indikator ini menargetkan 6 dokumen perencanaan pembangunan realisasi 14 dokumen yakni:
 - a) Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi :
 - Dokumen Perencanaan IKM Center;
 - Dokumen Perencanaan Ekonomi Kreatif
 - Dokumen Pengembangan Klinik Hewan

- Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Asean Economic Community
- Dokumen Perencanaan Pengembangan Kultur Jaringan
- b) Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya:
 - Dokumen RAD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - Dokumen Perencanaan Pengembangan PAUD dan Anak Berkebutuhan Khusus;
 - Masterplan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
 - Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - Masterplan Kawasan Budaya Mantyasih
- c) Dokumen Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana :
 - Dokumen Strategi Pengembangan Pemukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)
 - Masterplan Penataan RTNH di Plengkung Kalikota
 - Masterplan Kawasan Rejomulyo Gunung Tidar
 - Dokumen Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan

Dalam pencapaian indikator pertama ini, program-program yang diusung antara lain Program Perencanaan Bidang Ekonomi, Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya, Program Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana, Program Pengembangan Perumahan.

- 2) Indikator kedua : Tingkat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, tepat waktu dan tepat asas. Target 2014 di RPJMD 100% terealisasi 100%.

Dalam perencanaan pembangunan dikenal dokumen perencanaan terkait dengan periodisasi waktu seperti RPJMD, RPJMD dan RKPD. Sedangkan indikator kedua merupakan dokumen perencanaan pembangunan adalah dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam indikator pertama, artinya bukan dokumen perencanaan umum seperti RPJPD, RPJMD, RKPD. Tingkat penyusunan dokumen dokumen tersebut pada tahun 2014 telah memenuhi harapan target. Namun demikian di tahun-tahun mendatang perlu untuk lebih ditingkatkan cakupan serta perencanaan yang disesuaikan dengan RPJMD yang akan datang.

- 3) Indikator ketiga dan keempat bukan merupakan indikator tahunan, karena disusun bukan pada tahun 2013. Dokumen RPJPD 2005-2025 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tertanggal 23 Februari 2009, sedangkan dokumen RPJMD 2011-2015 ditetapkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tertanggal 28 Februari 2011.

- 4) Indikator kelima Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota mestinya bergabung dengan indikator keenam ditetapkannya dokumen perencanaan (RKPD) sesuai peraturan yang berlaku.

Dokumen RKPD yang disusun pada tahun 2014 adalah dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2015 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Magelang Nomor 15 Tahun 2014

Penetapan dokumen RKPD Kota Magelang telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010.

Beberapa ketentuan dimaksud antara lain :

- a) Bentuk dokumen : RPJPD dan RPJMD dalam bentuk Peraturan Daerah dan RKPd dalam bentuk Peraturan Walikota;
 - b) Waktu : Dokumen RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Walikota Magelang periode 2010-2014 dilantik pada tanggal 30 Agustus 2011 dan pada tanggal 28 Februari 2011 telah ditetapkan Perda RPJMD.
 - c) Dokumen RKPd ditetapkan paling lambat Akhir Mei Tahun 2014, sedangkan Dokumen RKPd Pemerintah Kota Magelang Tahun 2015 ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2014.
 - d) Isi : Sistematika dan isi telah disusun berdasarkan ketentuan pula, dimana didalam dokumen RPJMD dan RKPd telah dituangkan pula indikator kinerja secara terperinci.
 - e) Proses : telah melalui proses sesuai ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Permendagri 54 Tahun 2010.
- 5) Indikator ketujuh Tingkat Konsistensi Penjabaran program RPJMD kedalam RKPd;
Target 2014 Program-program dalam RPJMD dijabarkan ke dalam RKPd sebesar 90% dan terealisasi 90% dengan tingkat capaian 100 %
Program didalam RKPd 2015 dimana selain mendukung program prioritas sesuai Tema dalam RPJMD, program Unggulan Kepala Daerah seperti Magelang Kota Sejuta Bunga, Kota Layak Anak, Manajemen Persampahan dan Penanggulangan Kemiskinan serta RAD Antisipasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Program program yang direncanakan dengan terlebih dahulu didiskusikan melalui Focus Group Discussion (FGD).
- 6) Indikator kedelapan : Program dalam BA Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPd;
Hasil Musrenbang RKPd Kota Magelang Tahun 2015 Dituangkan kedalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPd Kota dan ditandatangani oleh 1 (satu) orang wakil dari setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang. Berita Acara sebagaimana dimaksud dijadikan sebagai Bahan untuk menyempurnakan rancangan RKPd menjadi rancangan akhir RKPd.
Musrenbang adalah suatu proses penjangkaran aspirasi masyarakat untuk pembangunan. Aspirasi tersebut harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan sebagai amanat rakyat pemilik kedaulatan negara, maka tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Namun demikian, aspirasi tersebut harus dibicarakan bersama dengan penuh kesadaran atas kemampuan, ketepatan, kemanfaatan dan segala kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Sehingga ditentukan pilihan-pilihan berdasarkan prioritas pembangunan.
- 7) Indikator kesembilan : Pelaksanaan Musrenbang;
Kegiatan Musrenbang RKPd Tahun 2015 Tingkat Kota Magelang merupakan satu proses dalam penyusunan RKPd Kota Magelang 2015, dan diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan pada Bulan Januari 2014, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada pertengahan Bulan Februari 2014. Dan untuk penyalarsan antara Renja SKPD dan hasil Musrenbang Kecamatan, maka dilaksanakan Forum SKPD dan FGD pada akhir

Februari 2014, yang dilanjutkan dengan verifikasi Renja SKPD hingga tanggal medio Maret 2014.

- 8) Indikator kesepuluh : Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah.

Revisi Target 2014 di RPJMD 80% terealisasi 90%

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah memiliki urgensi yang tinggi sebagai proses bottom up. Bentuk partisipasi yang nampak dan tersistem adalah musrenbang dan FGD. Musrenbang Kelurahan maupun kecamatan diselenggarakan di tingkat kelurahan dengan dihadiri oleh Berbagai komponen Masyarakat di Kelurahan seperti Ketua RT-RW dan tokoh masyarakat setempat, SKPD, perwakilan organisasi masyarakat, keterwakilan perempuan, LPM dan stakeholder lainnya. Musrenbang Kecamatan adalah kelanjutan dari Musrenbang Kelurahan yang dihadiri oleh perwakilan dari tiap kelurahan guna menentukan urutan-urutan prioritas dari usulan yang ada. Sedangkan Musrenbang tingkat Kota disamping diikuti semua perwakilan Kecamatan dan perangkat Kelurahan juga menghadirkan seluruh SKPD, anggota DPRD, LSM, asosiasi usaha dan akademisi.

c. Permasalahan yang dihadapi pada pencapaian sasaran ini yaitu:

- 1) Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi, antara lain dengan integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi.
- 2) Adanya ego atau kepentingan antarsektor yang mengakibatkan adanya kesulitan dan miskordinasi. Disamping itu persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya.
- 3) Perlunya pemahaman yang sama di SKPD terkait urgensi dan signifikansi perencanaan pembangunan daerah beserta indikator-indikator keberhasilan di masing-masing urusan yang diemban pada setiap level struktural. Hal ini akan meningkatkan fokus pencapaian indikator sebagai garda depan perencanaan dan penganggaran, bukan perencanaan penganggaran yang inkremental.
- 4) Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya.

d. Meskipun capaian kinerja pada sasaran ini sudah mencapai target, namun demikian, diperlukan kinerja monitoring dan evaluasi untuk semakin meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Beberapa rekomendasi yang dapat di lakukan antara lain :

- 1) Integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi. Pengintegrasian
- 2) Pemahaman kepada segenap stakeholders di SKPD, utamanya pemahaman persepsi melalui FGD, sosialisasi dan pertemuan mengawal proses perencanaan baik level SKPD maupun level Kota
- 3) Perlunya penyediaan data berbasis fakta yang melibatkan SKPD terkait. Validnya data akan cukup memberikan pengaruh bagi analisa maupun sumber pengambilan keputusan/kebijakan

- 4) Pemahaman dan sosialisasi terhadap seluruh TAPD secara internal maupun koordinasi antar SKPD dan Bappeda untuk memastikan agar TAPD saat mengawal dan verifikasi RKA harus mengacu pada RKPD
- 5) Penguatan pada mekanisme desk saat monev laporan hasil pelaksanaan Renja SKPD akan memberikan penguatan pada focus pencapaian indikator kinerja di tiap urusan yang diemban.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 2.349.986.176,00 dari anggaran sebesar Rp. 2.590.280.000,00. Apabila presentasi realisasi anggaran sebesar 90,72% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 120,08% maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

6. Terciptanya hubungan resiprositas (timbal balik) antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, masyarakat berbasis demokrasi dan transparansi informasi (penghormatan hak asasi, penegakkan hukum, dan pemenuhan kewajiban tanggungjawab pada publik)

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terciptanya hubungan resiprositas (timbal balik) antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, masyarakat berbasis demokrasi dan transparansi informasi (penghormatan hak asasi, penegakkan hukum, dan pemenuhan kewajiban tanggungjawab pada publik), sebagaimana tersaji pada tabel :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang dikeluarkan daerah	---	7	3	3	100,00%	3
2	Waktu rata-rata pembahasan Raperda / Perda	3	6	6	3	150,00%	3
3	Media Informasi Pemda yang dapat diakses publik	4	3	3	3	100%	3
4	Frekuensi koordinasi eksekutif dengan legislatif	---	12 kali	12	12	100,00%	12
5	Frekuensi komunikasi Pemda dengan tokoh masyarakat	---	24 kali	24	24	100,00%	24
6	Frekuensi komunikasi Pemda dengan pelaku usaha	---	12 kali	12	12	100,00%	12
7	Raperda yang disetujui DPRD	12	17	20	11	55,00%	
						100,71%	

- b. Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yang ditetapkan tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) perda Perda, yaitu :

1. Perda Manajemen Proteksi Kebakaran di Kota Magelang;
2. Perda Penyelenggaraan Perpustakaan;
3. Perda Jamkesda.

Jumlah raperda yang mengakomodir masukan masyarakat sejumlah 5 raperda yaitu :

1. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;
2. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Kepariwisataaan;
4. Lansia;
5. Penertiban umum (dubah menjadi ketertiban umum)

Waktu rata-rata pembahasan raperda antara eksekutif dan legislatif relatif tergantung dari tingkat kesulitan, kompleksitas materi dan agenda yang tersedia.

Media informasi yang tersedia meliputi :

1. *Website* :

- a) www.magelangkota.go.id, merupakan *website* resmi Pemerintah Kota Magelang yang dikelola oleh Bidang Pengelolaan Data Elektronik Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yang berisi informasi tentang profil Kota Magelang, kegiatan Pemerintah Kota Magelang, produk hukum, wisata dan lain-lain;
- b) idih.magelangkota.go.id, merupakan *website* jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kota Magelang yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang, berisi informasi mengenai produk hukum daerah dan pusat serta informasi hukum lainnya;
- c) bappeda.magelangkota.go.id, merupakan *website* yang dikelola oleh Bappeda Kota Magelang, berisi informasi perencanaan pembangunan di Kota Magelang;
- d) bp2t.magelangkota.go.id, merupakan *website* yang dikelola oleh BPPT Kota Magelang, berisi informasi mengenai pelayanan perizinan di Kota Magelang sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai tata cara permohonan perizinan serta mengetahui status pengajuan izin yang sedang dimohonkan;
- e) kotasejutabunga.magelangkota.go.id, merupakan *website* yang memberikan informasi mengenai Kota Magelang sebagai Kota Sejuta Bunga;
- f) kpm.magelangkota.go.id, merupakan *website* yang dikelola oleh Kantor Penanaman Modal Kota Magelang, berisi informasi mengenai dunia investasi/penanaman modal di Kota Magelang dan pelayanan perizinan penanaman modal di Kota Magelang;
- g) litbang.magelangkota.go.id, merupakan *website* yang dikelola oleh Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang, berisi informasi di bidang penelitian dan pengembangan serta informasi data statistik;
- h) disnakertransos.magelangkota.go.id, merupakan *website* yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kota Magelang, berisi informasi mengenai dunia ketenagakerjaan, transmigrasi, serta bidang sosial yang ada di Kota Magelang;
- i) pertanian.magelangkota.go.id, merupakan *website* yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang yang berisi informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang;
- j) dprd.magelangkota.go.id, merupakan *website* yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kota Magelang, berisi informasi mengenai persidangan DPRD, produk

hukum yang ditetapkan, serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Magelang;

2. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Magelang FM, merupakan Radio resmi milik Pemerintah Kota Magelang yang menyiarkan dan menginformasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Magelang selain untuk memberikan hiburan pada masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya;
3. Majalah *Dinamika*, yang merupakan media cetak yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Magelang dan dikelola serta diterbitkan oleh Bagian Humas, Protokol, dan Santel Sekretariat Daerah Kota Magelang;
4. *Pers Release* di surat kabar lokal dan regional.

Koordinasi eksekutif dengan legislatif dilakukan dalam bentuk rapat paripurna, rapat paripurna istimewa, rapat pimpinan DPRD, rapat fraksi, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Anggaran, rapat Badan Legislasi Daerah, rapat Badan Kehormatan, rapat panitia khusus, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum.

Bentuk komunikasi Pemerintah Daerah dengan tokoh masyarakat antara lain berupa forum kerukunan umat beragama (FKUB), sarasehan dengan tokoh masyarakat di Kelurahan-Kelurahan, kegiatan taraweh keliling, kegiatan jum'at keliling, kegiatan gowes bareng pejabat dan muspida meninjau wilayah kelurahan.

Komunikasi Pemerintah Daerah dengan pelaku usahadilakukan dalam bentuk rapat koordinasi, pembinaan, pelatihan, fasilitasi temu usaha dan lain-lain.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 16.819.906.294,00 dari anggaran sebesar Rp. 20.218.998.000,00. Apabila presentasi realisasi anggaran sebesar 83,19% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,71% maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

7. Terwujudnya peningkatan penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi semua

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi semua, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Tingkat penyelesaian permasalahan hukum	1	90%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan Perda	---	7	5	5	100%	20
3	Jumlah Perda/ Raperda yang mengakomodasi masukan masyarakat	18	17	5	5	100%	5
4	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota-operasipenegakkan perda	---	100%	75%	100%	133%	100%
Rata-rata capaian kinerja sasaran						108,33%	

- b. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
Proses penyusunan raperda di Kota Magelang secara keseluruhan telah dilaksanakan melalui mekanisme dengar pendapat dengan masyarakat yang dilaksanakan di tingkat kecamatan maupun kelurahan, melibatkan tokoh masyarakat, LSM, akademisi, dan stakeholder terkait.

Perda/Raperda sebagaimana tersebut diatas telah mengakomodasi masukan masyarakat melalui rapat dengar pendapat, sosialisasi, dan diskusi-diskusi lainnya.

Dalam rangka pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang dalam pelaksanaannya melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan dinas/instansi terkait guna melaksanakan operasi penegakan Peraturan Daerah, antara lain :

- 1) Penegakan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, melalui pengawasan dan penertiban bangunan gedung termasuk menara telekomunikasi yang belum memiliki IMB dan/atau menyalahi ketentuan mengenai bangunan gedung;
- 2) Penegakan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), melalui penertiban PKL yang berjualan pada lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- 3) Penegakan ketentuan mengenai reklame dalam bentuk penertiban reklame, yang bekerja sama dengan BP2T dan dinas/instansi terkait.
- 4) Penertiban spanduk dan baliho terkait dengan izin reklame dan kewajiban pembayaran pajak reklame yang belum dipenuhi oleh wajib pajak.
- 5) Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial. Operasi ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 83.028.600,00 dari anggaran sebesar Rp. 112.362.000,00. Apabila presentasi realisasi anggaran sebesar 73,89% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 108,33% maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

8. Terwujudnya ketaatan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja terwujudnya ketaatan pemerintah daerah pada peraturan perundang-undangan, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Ditetapkannya Perda APBD tepat waktu	Terlambat	Tepat Waktu	tepat waktu	tepat waktu	100%	Teapt waktu
2	Kesesuaian kelembagaan SKPD dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	100%	sesuai
Rata-rata capaian kinerja sasaran						100%	

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 12

Tahun 2011, Pemerintah Kota Magelang bersama-sama dengan DPRD Kota Magelang telah menetapkan Perda Nomor 18 Tahun 2012 tentang APBD Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 28 Desember 2012 dan Perda Nomor 17 tentang APBD Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 31 Desember 2013.

Struktur Kelembagaan SKPD Pemerintah Kota Magelang disusun dan ditetapkan masih berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 57 Tahun 2007. Meskipun Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan tetapi sesuai edaran dari pusat belum ada Peraturan pemerintah pengganti PP Nomor 41 Kota Magelang masih berpedoman pada :

- 1) Perda SOTK Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan , kedudukan dan tugas pokok sekretariat daerah dan sekretaria dewan perwakilan rakyat daerah;
- 2) Perda SOTK Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan , kedudukan dan tugas pokok organisasi dinas daerah;
- 3) Perda SOTK Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan , kedudukan dan tugas pokok organisasi lembaga teknis daerah, badan pelayanan perizinan terpadu dan satuan polisi pamong praja;
- 4) Perda SOTK Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan , kedudukan dan tugas pokok organisasi kecamatan dan kelurahan;

Perda yang disetujui DPRD di tahun 2014 adalah sebanyak 11 raperda antara lain :

- 1) Perda No 1 Tahun 2014 tentang Penataan Ruang Terbuka hijau;
 - 2) Perda No 2 Tahun 2014 tentang Manajemen Proteksi Kebakaran di Kota Magelang;
 - 3) Perda No 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 - 4) Perda No 4 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kota Magelang;
 - 5) Perda No 5 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2013,
 - 6) Perda No 6 Tahun 2014 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2013;
 - 7) Perda No 7 Tahun 2014 tentang Penambahan penyertaan modal daerah ke dalam Perusahaan daerah air minum Kota Magelang dan PerusdaBPR Bank Magelang;
 - 8) Perda No 8 Tahun 2014 tentang APBD Tahun anggaran 2015;
 - 9) Perda No 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penguji Kendaraan Bermotor;
 - 10) Perda No 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Magelang;
 - 11) Perda No 11 Tahun 2014 tentang Branding Kota Magelang.
- c. Perlu diupayakan identifikasi terhadap ketentuan/aturan yang harus ada sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Misi kedua : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan mendorong tumbuhnya iklim investasi untuk pengembangan usaha yang mampu membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat.

1. Terciptanya keterpaduan sumber pendanaan baik dari pusat, provinsi dan daerah.

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terciptanya keterpaduan sumber pendanaan baik dari pusat, provinsi dan daerah, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Rasio dana DAK, TP, Dekonsentrasi dan dana hibah serta dana bantuan lainnya terhadap total APBD	---	14%	17%	7,05%	41%	18%

Tabel 3.4

Sumber Pendanaan APBD Kota Magelang Tahun 2014

Sumber Dana	Besarnya
- DAK	34.209.870.000,00
- TP/UB	525.478.535,00
- bantuan keu prov	7.678.025.000,00
- hibah	3.905.285.000,00
- bansos	3.519.835.000,00
- APBD	707.134.620.000,00

Sumber : DPPKD dan Bappeda, 2014

- b. Rekomendasi

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Rasio dana DAK, TP, Dekonsentrasi dan dana hibah serta dana bantuan lainnya terhadap total APBD dirasa kurang relevan, karena berlawanan dengan paradigma otonomi (kemandirian) daerah.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 404.893.300,00 dari anggaran sebesar Rp. 415.887.000,00. Apabila presentasi realisasi anggaran sebesar 97,36% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,00% maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

2. Terkelolanya aset-aset daerah.

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terkelolanya aset-aset daerah, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
11	Rasio nilai aset daerah yang dikelola	69%	69%	75%	75%	100%	80%
2	Rasio nilai aset yang terdata			65%	65%	100%	-
Rata-rata capaian kinerja						100%	

- b. Pengelolaan aset daerah merupakan pekerjaan yang membutuhkan perhatian khusus dan tidak mudah. Salah satu penyebabnya karena aset-aset lama (dari jaman dahulu) banyak yang tidak memiliki bukti kepemilikan secara lengkap maupun bukti-bukti lain yang bisa mendukung administrasi aset. Contohnya tanah, sebenarnya ada banyak lahan atau tanah milik Pemerintah Kota Magelang yang sertifikatnya akan tetapi belum dibalik nama atau masih atas nama pemilik sebelumnya padahal tanah tersebut sudah dibeli oleh pemerintah. Hal ini sangat mempengaruhi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penilaian aset sehingga sampai saat ini Kota Magelang masih dinilai WDP (Wajar Dengan Pengecualian).
- c. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 730.765.125,00 dari anggaran sebesar Rp. 882.897.000,00. Apabila presentasi realisasi anggaran sebesar 82,77% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,00% maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

3. Terciptanya kemudahan akses pendanaan melalui lembaga-lembaga keuangan serta membangun kemitraan dalam memanfaatkan skema pendanaan al: Kerjasama pemerintah dan swasta (KPS)/Public Private Partnership (PPP), Corporate Social Responsibility (CSR) dan donasi/zakat).

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terciptanya kemudahan akses pendanaan melalui lembaga-lembaga keuangan serta membangun kemitraan dalam memanfaatkan skema pendanaan al: Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)/ Public Private Partnership (PPP), Corporate Social Responsibility (CSR) dan donasi/zakat, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2013	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah kerjasama dengan lembaga keuangan	3	3	2	4	200%	3
2	Jumlah kerjasama dengan swasta	ada	ada	ada	Ada	100%	Ada
3	Jumlah dan jenis bank dan cabang perusahaan asuransi	---	31 bank; 5 Asuransi	54 bank 11 asuransi	35 bank 5 asuransi	64,81%	55
4	Tingkat Perkembangan BUMD	19,76%	3,19%	4%	10,81%	270%	11%
5	Jumlah inovasi/diversifikasi produk BUMD	---	7	7	5	71,43%	-
6	Nilai kontribusi perusda terhadap PAD	3,36%	2,70%	3%	2,30%	76,67%	2%
Rata-rata capaian kinerja sasaran						102,58%	

- b. Pada tahun 2014 terdapat 4 buah kerjasama dengan lembaga keuangan yaitu 1 kerjasama dengan BKK Kota Magelang dan 3 buah kerjasamadengan Bank Magelang.

Kerjasama dengan swasta yang terjadi di tahun 2013 adalah kerjasama operasional (KSO) yang terdapat di Perusda Taman Kyai Langgeng sebanyak 3 buah dan 1 buah kerjasama yang terdapat di Perusda Perbengkelan Prima Oto.

Jumlah bank/BPR dan asuransi di Kota Magelang adalah 31 bank/BPR dan 5 asuransi.

Target perkembangan BUMD sebesar 4% tercapai 10,81%.

Inovasi/diversifikasi produk BUMD terdiri dari 5 buah inovasi dari Perusda Taman Kyai Langgeng, 1 buah inovasi produk dari PDAM dan 1 buah inovasi produk dari Perusda Percetakan Vita.

Kontribusi perusda tidak mencapai target dan turun dibanding tahun sebelumnya.

- c. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 187.205.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 194.042.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 96,47% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 93,06%.

4. Terwujudnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah dan macam pajak	9	10	10	10	100%	10
2	Jumlah dan macam retribusi Daerah	3	3	3	3	100%	3
3	Rasio PAD terhadap APBD	14,03%	13,27%	3,35%	16%	478%	16%
Rata-rata capaian kinerja sasaran						226%	

- b. Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 1, angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Peraturan Daerah yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1) berasal dari: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Yang termasuk komponen Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, telah diterbitkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Daerah Kota Magelang telah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah Terkait Pajak dan Retribusi Daerah antara lain :

- 1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP),
- 2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah,
- 3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
- 4) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
- 5) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha,
- 6) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- 7) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya: baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Peran Pajak Daerah di Kota Magelang terhadap PAD idealnya semakin tahun semakin membaik, karena Kota Magelang sebagai daerah perkotaan mengandalkan jasa sebagai salah satu sumber penghasil PAD. Perolehan Pajak Daerah di Kota Magelang setiap tahun mengalami perkembangan yang cukup baik (ada kenaikan / melebihi target yang ditetapkan). Lebih detail jika dilihat dari kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Magelang, selama lima tahun terakhir 2008-2013 cenderung (naik dan turun). Pada kurun waktu 2008-2013 kontribusinya mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2011 naik kembali baik besarnya maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli .

Mengingat pentingnya peranan pajak dan retribusi daerah dalam membiayai pembangunan di Kota Magelang, pemerintah Kota Magelang harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

- 1) Pengggalian potensi Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip-prinsip :

realistis dan elastis (artinya dapat / mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat) serta adil dan merata secara vertikal dan horisontal (vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak).

- 2) Melakukan perluasan basis penerimaan pajak dan retribusi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- 3) Melakukan Penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pajak bagi pembangunan daerah sehingga secara politis dapat diterima oleh masyarakat, yang kemudian akan menimbulkan motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- 4) Memperkuat proses pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
- 5) Melaksanakan tertib administrasi pungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan administrasi harus fleksibel artinya sederhana dan mudah dihitung.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah (meningkatkan kualitas kinerja layanan lembaga/satuan kerja pemungut dan pengelola pajak dan retribusi daerah) sehingga akan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi si wajib pajak.
- 7) Menyederhanakan prosedur pengelolaan Pajak dan Retribusi menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik / wajib pajak.
- 8) Meningkatkan pengawasan. Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidental / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.
- 9) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan pajak. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- 10) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Magelang.

Pemerintah Kota Magelang dalam melakukan penggalan potensi dan penetapan obyek-obyek pajak baru juga harus selalu memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan saat ini, disarankan agar pengadaan pajak

dan retribusi baru perlu dipertimbangkan secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan gejolak dimasyarakat yang pada gilirannya akan mendistorsi kegiatan perekonomian di Kota Magelang. Penciptaan suatu jenis pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga perlu mempertimbangkan ketepatan suatu jenis pajak sebagai pajak daerah, karena pajak daerah yang baik akan mendorong peningkatan pelayanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Magelang.

Jumlah dan macam pajak di Kota Magelang terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Parkir
- 7) Pajak Sarang Burung Walet
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan
- 10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 113.775.910,00 dari anggaran sebesar Rp. 218.287.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 52,12% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 226,00 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

5. Terciptanya kerjasama antar daerah dalam hal investasi.

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terciptanya kerjasama antar daerah dalam hal investasi sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah dan jenis kerjasama antar daerah yang berhasil dijalin	2	3	3	3	100%	3

- b. Kerjasama antar daerah dibidang investasi dapat terealisasi sesuai yang ditargetkan, yakni 3 kerjasama dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Kerjasama yang terjalin dilaksanakan antara PDKPM dengan penandatanganan MoU oleh kedua belah pihak, baik dibidang promosi, fasilitasi terhadap UMK dan UMB antara kedua belah pihak, maupun kegiatan lain yang menjadi tupoksi bidang penanaman modal. Disamping itu juga telah dilaksanakan penjajagan kerjasama antar daerah dengan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, yang akan ditindaklanjuti dengan MoU pada tahun 2015. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kerjasama yang terjalin ditahun 2014 ini lebih meningkat kualitasnya, meskipun secara prosentase yang dicapai lebih rendah dari tahun 2013, dikarenakan pada tahun 2014 kerjasama yang terjalin

dilaksanakan langsung oleh PDKPM kedua daerah. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya kerjasama yang dilaksanakan mengikuti kerjasama yang dilaksanakan oleh PDPPM Provinsi Jawa Tengah dengan PDPPM Provinsi yang lain seperti Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Bengkulu.

Peningkatan capaian kinerja didukung dengan pelaksanaan penjajagan potensi investasi dengan Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Bengkulu. Kemudian untuk memperkuat jalinan kerjasama langkah yang perlu dilakukan selanjutnya adalah penyusunan nota kesepakatan terkait kerjasama tersebut, agar ada jaminan yang lebih antara kedua belah pihak yang bekerjasama. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 60.534.750,00 dari anggaran sebesar Rp. 63.812.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 94,86 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

6. Terciptanya iklim investasi dan realisasi investasi

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terciptanya iklim investasi dan realisasi investasi, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Bertambahnya laju pertumbuhan investasi	138	151	315	821	260%	285
2	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN	26298375548	30298065569	24653522764	45068596864	182,81%	24650000000
Rata-rata capaian kinerja sasaran						221,40	

- b. Laju pertumbuhan investasi dapat terealisasi dengan sangat tinggi, diatas 100%. Hal tersebut terjadi karena gencarnya promosi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang. Peningkatan laju pertumbuhan ditopang oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (55,08%), disusul sektor bangunan/konstruksi (21,88%), selanjutnya sektor jasa (18,28%), sektor keuangan dan persewaan (3,81%), sektor industri pengolahan (0,70%), sektor pengangkutan dan komunikasi (0,11%), sektor listrik, gas dan air bersih (0,09%), dan kecil dari sektor pertanian (0,02%), adapun sektor pertambangan dan energi tidak ada investasi dikarenakan memang tidak ada lahan yang memungkinkan.

Dari tahun ke tahun capaian kinerja indikator laju pertumbuhan investasi semakin meningkat, tahun 2012 sebesar 202,62%, 2013 sebesar 226,10%, adapun di tahun 2014 ini sebesar 260,63%. Terlihat bahwa peningkatan dari tahun ke tahun semakin bertumbuh. Hal tersebut tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, tetapi juga berkembangnya sektor-sektor non riil yang lain, sebagai multiplier effect dari bertumbuhnya investasi di Kota Magelang. Contoh : pertumbuhan pkl yang meningkat pesat tertata di lokasi yang tersedia, pertumbuhan usaha mikro dan kecil (makanan, batik, kerajinan, dan lainnya), perparkiran.

Realisasi kinerja tahun 2014 ini telah melebihi perencanaan yang tertuang dalam RPJMD 2011-2015, yang menargetkan kondisi pada tahun 2015 tercapai sebanyak 358 investasi yang ditanamkan di Kota Magelang.

Investasi sektor riil yang meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor bangunan/konstruksi, sektor keuangan dan persewaan, sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pertanian, juga terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun dari sektor pertambangan dan energi tidak ada di Kota Magelang karena kawasan/lahan yang tidak memungkinkan untuk usaha di sektor tersebut.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya investasi sektor riil mengalami kenaikan, dari tahun 2012 ke 2013 mengalami kenaikan sebesar 60,66% dengan adanya investasi Hotel Atria (PMA) yang menanamkan modal sebesar Rp.170.000.000.000,-(33,74% dari total nilai investasi di tahun 2013). Adapun dari 2013 ke 2014 mengalami peningkatan sebesar 7% dari nilai investasi yang ditanamkan, akan tetapi dari pelaku investasi tetap mengalami peningkatan sebesar 33,50%, naik daripada tahun 2013 sebesar 32,54%.

Sebagai Kota Jasa layak Kota Magelang investasi di sektor jasa bertumbuh dengan pesat.

Investasi sektor jasa mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10% per tahun.

Kenaikan Nilai Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri dapat terealisasi sangat tinggi dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemain lokal mengalami peningkatan dalam menanamkan modalnya untuk investasi. Investasi tumbuh berkembang sejalan dengan pemikiran manusia untuk perbaikan penghidupan dan kehidupan di masa yang akan datang, dan masyarakat kita mulai berpaling kearah yang menjanjikan tersebut, tidak sekedar menumpuk harta kekayaan. Tentu saja hal tersebut akan menguntungkan bagi pemerintah guna mendorong perekonomian, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output, penghematan devisa bahkan pada saatnya mampu menambah devisa.

Capaian kinerja dari tahun ke tahun semakin meningkat, dapat kita bandingkan dengan tahun 2012 sebesar 106,73%, tahun 2013 sebesar 122,93%, dan di tahun 2014 melonjak dengan 182,81%. Dari angka tersebut terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja formil semakin meningkat, demikian juga dengan tenaga kerja non formil terserap untuk mengakomodasi kebutuhan aktifitas investasi. Yang pada ujungnya akan semakin mengikis kemiskinan yang ada di Kota Magelang.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 563.178.150,00 dari anggaran sebesar Rp. 597.185.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 94,31 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 555,81 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

7. Terwujudnya kemudahan pelayanan dalam mendorong peluang investasi di daerah.

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya kemudahan pelayanan dalam mendorong peluang investasi di daerah, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahunan 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	2	7	2	7	350%	2
2	Lama proses perizinan	5 hari	3,5 hari	4	3,5	113%	2
3	Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota	---	100%	pendaftaran izin prinsip, izin usaha, penanaman modal, SIUP, TDP	pendaftaran izin prinsip, izin usaha, penanaman modal, SIUP, TDP	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja sasaran						187,67%	

b. Pada tahun 2014 ini tidak menargetkan penerbitan Peraturan Daerah (Perda), dikarenakan Perda yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya sudah dianggap mencukupi untuk mendukung iklim usaha di Kota Magelang, yang mana untuk pelaksanaannya hanya perlu dengan Peraturan Walikota. Adapun Perda yang sudah diterbitkan adalah sebagai berikut :

- 1) Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal;
- 2) Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas BPD Bank Jawa Tengah
- 3) Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan;
- 4) Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Terminal;
- 5) Perda No. 8 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang, Perusahaan Daerah Perbengkelan, Perusahaan Daerah Percetakan, Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Lenggeng dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang.
- 6) Perda No. 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi
- 7) Perda No. 16 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Lama proses perizinan yang dilimpahkan kewenangannya ke BP2T selama ini rata-rata 5 hari kerja dapat dipercepat menjadi 3,5 hari kerja terhitung setelah berkas lengkap dan benar sesuai persyaratan. Namun demikian untuk perizinan yang ditandatangani Kepala Daerah masih membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus melalui alur yang lebih panjang, terkadang bisa sampai beberapa minggu/ bulan.

Pendaftaran Penanaman modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman modal Dalam Negeri, TDP, SIUP, Perpanjangan

IMTA terkait dengan pendaftaran izin prinsip dan izin usaha yang sudah terintegrasi dalam sistem pelayanan perizinan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 8.999.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 8.999.000,00 atau prosentasi realisasi anggaran sebesar 100 %. Sedangkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 82,60%.

8. Terbangunnya kepercayaan/komitmen antara stakeholder dengan dunia usaha.

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terbangunnya kepercayaan/ komitmen antara stakeholder dengan dunia usaha, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	154	618	170	206	121%	180
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	615.543.34 5.98	235.754.73 4.598	7979346 8775	4506859 6000	56%	522105 41297
3	Jumlah MOU dalam investasi	0	0	2	3	150%	2
4	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	---	1 keg	1	2	200%	1
5	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	50 peserta	1 keg ; 50 peserta	1	1	100%	1
Rata-rata capaian kinerja sasaran						109%	

- b. Investor skala nasional belum dapat mencapai target yang diharapkan, di tahun ini baru tercapai 97,38% yakni 45 dari 46 yang ditargetkan. Sebenarnya Kota Magelang sangat menarik untuk dijadikan tempat investasi, dikarenakan situasi yang kondusif dan letak geografis yang strategis. Tetapi investor skala nasional kebanyakan terbentur pada luasan lahan yang tidak memungkinkan. Sehingga hanya investasi yang membutuhkan lahan relatif kecil yang bisa berinvestasi di Kota Magelang. Tetapi apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa pada tahun 2014 lebih meningkat dari pada 2013, dan 2013 lebih meningkat dari tahun 2012. Hal tersebut membuktikan bahwa investor yang berskala nasional pun melirik ke Kota Magelang, tetapi sedang mencari kegiatan investasi yang tepat dilaksanakan di Kota Sejuta Bunga ini.
- Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan, yakni dengan lebih gencar dan menarik dalam mempromosikan Kota Magelang, salah satunya dengan adanya kegiatan Ayo ke Magelang 2015, akan lebih menarik investor nasional datang dan menanamkan modal di Kota Magelang.
- Jumlah investor skala nasional memang tidak dapat mencapai target, tetapi jumlah nilai investasi melampaui target secara signifikan, realisasi sebesar 311,81% dari

target yang ditentukan, hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi karena investor skala nasional berkecenderungan pada kegiatan investasi dengan nilai yang besar. Pada umumnya mereka bergerak di Perhotelan, Mall super market.

Tahun 2012 dimulai dengan hadirnya Superindo dan mergernya permodalan Matahari dengan pihak asing, serta kegiatan investasi yang lain membukukan angka 61.554.334.598 rupiah tertanam modalnya di Kota Magelang. Pada tahun 2013 tertanam 235.754.734.598 rupiah, dengan adanya hotel berbintang 4 Atria Hotel, dan diakhir tahun 2014 tercatat nilai investasi sebesar 248.805.234.598 rupiah. Terlihat jelas bahwa dari tahun ke tahun nilai investasi yang ditanamkan oleh investor nasional semakin meningkat.

Jumlah investor baru yang masuk baik nasional maupun regional di tahun 2014 sebanyak 206 investor, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan, tahun 2013 sebanyak 152 investor, dan tahun 2012 sebanyak 146 investor.

MoU dalam investasi terbangun antara pemerintah dengan investor dalam kegiatan pembangunan kios di Pasar Rejowinangun, sehingga untuk tahun 2014 dapat terealisasi sesuai dengan target, adapun untuk tahun-tahun sebelumnya belum terealisasi.

Bimbingan pelaksanaan penanaman modal terlaksana di tahun 2014 ini, sebanyak 2 kali, yakni bimbingan kepada para UMKM dengan menghadirkan narasumber dari Sragen, seorang pengusaha UMKM makanan yang merangkak sukses, dan akhirnya memiliki usaha franchise makanan. Dan bimbingan kepada usaha bunga anggrek dengan narasumber pengusaha anggrek sukses di Kota Magelang. Sehingga dengan adanya 2 kegiatan tersebut, maka capaian kinerja sebesar 200% dari 1 kegiatan yang ditargetkan.

Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha dilaksanakan secara bertahap kepada pengusaha mengenai Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari KPM, BP2T, Diskoperindag, Disporabudpar, dan Disnakertransos. Pelaksanaan dilaksanakan secara bertahap dikarenakan disamping sosialisasi juga bimbingan tentang kebijakan LKPM sesuai dengan Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Perda Kota Magelang No.1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal. Sasaran 50 orang pengusaha, setiap tahap 10 orang pengusaha. Disamping itu juga dilaksanakan melalui forum Bakohumas. Capaian kinerja 100%.

Tahun 2012 dilaksanakan sosialisasi tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Gedung Wanita, yang dilaksanakan oleh BP2T dengan sasaran seluruh stakeholder sebanyak 100 orang, adapun pada tahun 2013 dilaksanakan langsung kepada pengusaha tentang hak dan kewajiban penanam modal.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 261.101.600,00 dari anggaran sebesar Rp. 389.792.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 66,98 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 109,00 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

9. Terwujudnya pengembangan infrastruktur kawasan strategis dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian kota

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya pengembangan infrastruktur kawasan strategis dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian kota, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Bertambahnya jumlah pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	0	0	1	3	300%	3

- b. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh pada tahun 2014 tidak dilaksanakan penyusunan profil, dikarenakan terbatasnya anggaran, sehingga capaian kinerja tetap seperti tahun 2013 yakni 3 kawasan yang sudah di profilkan, adapun menurut dokumen RPJMD target sampai dengan 2015 adalah 3 kawasan. Sehingga dapat dikatakan pada tahun 2014 ini kita telah mencapai target sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD.

Adapun pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sudah diprofilkan adalah:

- 1) Kawasan Sidotopo, dengan nilai investasi sebesar Rp. 257.172.586.956,32IRR : 11,87%PI : 1,02NPV :5285758622IRR : 11,87%
- 2) Kawasan Pusat Kota, dengan nilai investasi sebesar Rp. 81.354.477.426,25PI : 1,02NPV1672107185
- 3) Kawasan Lembah Tidar, dengan nilai investasi sebesar Rp. 111.579.103.742,9IRR : 12,30%PI : 1,03NPV :3794915733

Upaya untuk menambah jumlah pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh akan dilaksanakan pada tahun 2015.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 53.274.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 58.150.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 91,61 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 300 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

10. Terbangunnya kemitraan dengan memanfaatkan skema pendanaan melalui Kerjasama pemerintah dan swasta PES (*Payment for Ecological/Environment Services = imbal jasa lingkungan*)

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya pengembangan infrastruktur kawasan strategis dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian kota, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha	1 keg; 50 peserta	1 keg	1	1	100%	1

- b. Matchmaking suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memfasilitasi kemitraan usaha UMKM dengan Usaha Besar telah dilaksanakan di Hall Hotel Puri Asri, dihasilkan 42 Lol antara UMKMK dengan Pengusaha besar, antara lain : Hotel Atria, Hotel Puri Asri, Hotel Trio, Gardena Supermarket.

Disamping kegiatan yang dilaksanakan di Kota Magelang, juga memfasilitasi UMKMK keluar Kota Magelang dengan mengikuti Matchmaking yang diselenggarakan oleh BPMD Provinsi Jawa Tengah, dengan lokasi bergilir dimasing-masing bakorwil se Jawa Tengah. Sehingga kalau dilihat capaian kerjanya 100% untuk fasilitasi di Kota Magelang, plus fasilitasi di luar Kota Magelang. Dari kegiatan ini telah terjalin hubungan antara pengusaha Kota Magelang dengan Klaten, Salatiga yang sampai saat ini masih berkelanjutan.

Tahun-tahun sebelumnya juga dilaksanakan kegiatan serupa yang mendapatkan dukungan SKPD terkait, diantaranya Diskoperindag membuat etalase di hotel untuk mempromosikan produk-produk unggulan hasil UMKMK di Kota Magelang. Kegiatan ini rutin dilaksanakan sehingga sekarang mulai muncul kesepahaman diantara mereka.

Upaya fasilitasi kemitraan usaha ditempuh melalui kegiatan temu usaha antara Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB).

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 15.055.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 15.155.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 99,34 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

11. Terwujudnya identifikasi investasi swasta

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya identifikasi investasi swasta, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Nilai investasi swasta	412272118548	613070184117	405000000000	450685960000	111%	40.500 ribu
2	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	4	4	1 kawasan	1 kawasan	100%	1 kawasan
3	Jenis investasi swasta			PMDN	PMDN	100%	PMDN
Rata-rata capaian kinerja sasaran						105.50%	

- b. Nilai investasi swasta di Kota Magelang tahun 2014 telah terealisasi sebesar 541,19% dari target yang ditetapkan, demikian juga untuk tahun-tahun sebelumnya.

12. Tersedianya data dan informasi ketenagakerjaan yang aksesibel dan akurat

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran tersedianya data dan informasi ketenagakerjaan yang aksesibel dan akurat, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Sebaran informasi bursa kerja yang terupdate	17 kel.	17 kel.	17	17	100%	17

- b. Informasi lowongan kerja bagi warga masyarakat pencari kerja disebarakan di seluruh Kelurahan agar informasi lowongan kerja tersebut dapat diakses oleh seluruh warga masyarakat. Info lowongan kerja juga dapat diakses secara elektronik melalui penyediaan Fasilitas Bursa Kerja On Line. Pelaksanaan Job Fair juga cukup efektif dalam mempertemukan pencari kerja dan penyedia kerja dalam proses Walk In Interview untuk memperoleh secara cepat kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan. Agar informasi tersebut bisa menjangkau sampai ke lapisan masyarakat, sosialisasi dilakukan di seluruh Kelurahan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 269.770,00 dari anggaran sebesar Rp. 253.718.280,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 94,05 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 105,5 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

13. Terwujudnya pembangunan BLK di tingkat Kota

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya pembangunan BLK di tingkat kota, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Perencanaan Manajemen dan operasional BLK – jumlah blk	1 dok.	ada	1 dok	1 dok	100%	1

- b. Dokumen Perencanaan Manajemen dan Operasional bagi Balai Latihan Kerja (BLK) berfungsi sebagai petunjuk operasional kegiatan pelaksanaan pelatihan baik terkait kebutuhan sarana prasarana BLK, kurikulum pelatihan serta kebutuhan Sumber Daya Manusia bagi pemenuhan kebutuhan pasar kerja .

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 5.405.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 3.237.095.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 16,70 % sedangkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 %.

14. Tercapaiannya peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran tercapainya peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Prosentase pencari kerja yang ditempatkan	70%	58%	31%	98,10%	316,45%	32%
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	---	905	100%	98,10%	98,10%	100%
3	Rasio daya serap tenaga kerja	01:01,1	1.825:618	16500	2593 : 824	315%	16500
4	Sebaran informasi bursa kerja yang terupdate	17 kel.	17 kel.	17 kel.	17 kel.	100%	17
5	Prosentase transmigran yang ditempatkan	---	100%	4 kk	4 kk	100%	4 kk
Rata-rata capaian kinerja sasaran						185.91%	

- b. Prosentase pencari kerja yang ditempatkan merupakan indikator ketenagakerjaan yang mencerminkan kinerja instansi secara langsung, dimana fungsi pelayanan bursa kerja daerah terlaksana. Tahun 2014 ini capaian indikatornya melebihi target SPM nasional yang telah ditetapkan yaitu 40 persen.

Peningkatan persentase penempatan tenaga kerja ini dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah untuk tidak mensyaratkan kartu antar kerja (AK-1) ketika melakukan pendaftaran seleksi Pegawai Negeri Sipil dan mewajibkan kartu AK-1 ketika melakukan pemberkasan penerimaan Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu pemanfaatan teknologi informasi yang ada sangat membantu dalam penyebaran informasi kebutuhan tenaga kerja yang tersedia.

Ketika kenaikan nilai investasi terus meningkat, maka daya serap tenaga kerja juga akan meningkat. Hal itu terbukti bahwa dari tahun 2012 sampai 2014, daya serap tenaga kerja mengalami kenaikan yang luar biasa, disokong dengan adanya aktifitas PMA (Hotel ATRIA ****) yang merekrut hampir 100 orang tenaga kerja di tahun 2013, dengan capaian 325%, diikuti tahun 2014 dengan 315% meskipun tidak ada PMA yang hadir di Kota Magelang.

Penempatan Tenaga kerja pada tahun 2014 oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang terealisasi 98,10%. Dari 579 orang yang terdaftar sebagai pencari kerja dapat ditempatkan sebanyak 568 orang untuk memperoleh pekerjaan. Program Penempatan Transmigrasi untuk warga Kota Magelang diberi jatah sebanyak 4 KK, seluruhnya telah ditempatkan di Lokasi Penempatan transmigrasi di Kabuapten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dengan potensi usaha kelapa sawit. Penempatan ini memberikan harapan warga yang bertransmigrasi bisa memperoleh peluang penghidupan yang lebih baik di lokasi penempatan transmigran untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Fasilitasi penempatan tenaga kerja ini dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme yaitu melalui *matching system* dimana petugas antar kerja melakukan penawaran kepada pencari kerja sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan job fair dimana perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan pencari kerja bertemu secara langsung dalam suatu waktu tertentu. Adapun lowongan pekerjaan yang tersedia didapatkan oleh pengantar kerja melalui job canvassing ke perusahaan-perusahaan di wilayah Kota Magelang dan sekitarnya maupun perusahaan yang secara aktif mengirimkan kebutuhan tenaga kerja.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 129.893.500,00 dari anggaran sebesar Rp. 138.485.000,00. Presentasi realisasi

anggaran sebesar 93,80 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 185,91 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

15. Tercapaiannya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran tercapainya peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	---	68,93%	63,2%	68,49%	108,37%	63,2%
2	Tingkat pengangguran terbuka	---	6,80%	10%	7,38%	73,80%	9%
3	Calon tenaga kerja yang terdidik (pencari kerja terlatih)	22,70%	55,94%	10%	68,80%	688,00%	10,5%
4	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	69,16%	62,78%	80%	58,50%	73,13%	80%
5	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	30,84%	30,30%	70%	70%	100%	70%
6	Besaran pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	70%	81,08%	70%	70%	100%	70%
Rata-rata capaian kinerja sasaran						190,55%	

- b. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan antara jumlah pekerja baik sektor formal maupun informal, terhadap penduduk usia kerja (15 – 64 tahun). TPAK merupakan hasil Survey yang dilaksanakan oleh BPS.

Dunia kerja saat ini, menuntut seorang pekerja mempunyai kompetensi dan ketrampilan dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang melalui Balai Latihan Kerja memberikan Pelatihan kerja kepada pencari kerja untuk memenuhi standar kompetensi permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Sebagian orang berminat untuk mengembangkan dirinya menjadi seorang wirausahawan. Program Pelatihan kewirausahaan mempersiapkan peminat usaha mandiri menjadi pengusaha mandiri yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan di tengah-tengah masyarakat, sehingga diharapkan tumbuh peluang-peluang kerja baru untuk pengentasan masalah pengangguran.

Upaya penanganan tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) fungsi yaitu (1) pelatihan kepada pencari kerja dan pekerja untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas (2) fasilitasi penempatan tenaga kerja dan (3) fasilitasi dan pengawasan terhadap tenaga kerja.

Berdasarkan capaian kinerja bidang ketenagakerjaan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator ketenagakerjaan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan capaian realisasi pelatihan berbasis masyarakat perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebutuhan pelatihan. Untuk itu sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bisa langsung diakses oleh masyarakat

pada umumnya dan pencari kerja/penganggur pada khususnya. Saat ini pemanfaatan jejaring sosial yang sedang berkembang dan menjadi trend serta kerjasama dengan stasiun radio yang mempunyai sasaran pendengar angkatan kerja/usia kerja berusia 15 – 30 tahun sangat diperlukan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 129.893.500,00 dari anggaran sebesar Rp. 138.485.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 93,77 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 190,55 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

16. Terwujudnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Angka sengketa (perselisihan) pengusaha pekerja per tahun	---	1 kasus	16	9	56%	15
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	---	100%	50%	100%	200%	50%
3	Jumlah SP yang terbentuk di tingkat perusahaan	---	78 unit	22 unit	78 unit	354,55%	22
Rata-rata capaian kinerja sasaran						203.52%	

- b. Keberadaan lembaga yang mewadahi sekumpulan pekerja dalam Serikat Pekerja sangat bermanfaat sebagai forum komunikasi antara pengusaha dan pekerja dalam menjalin hubungan pekerjaan. Melalui pembinaan lembaga ketenagakerjaan dalam bentuk Serikat Pekerja diharapkan perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja bisa ditekan seminimal mungkin.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 48.325.450,00 dari anggaran sebesar Rp. 53.539.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 90,17 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 203,52 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

17. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah LKS Bipartit	18 unit	4 unit	33 unit	33 unit	100%	33
2	Jumlah masukan LKS Tripartit dalam memberikan pertimbangan ketenagakerjaan kepada pimpinan daerah	30%	1 masukan	4	4	100%	4

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
3	Besaran pemeriksaan perusahaan	35%	67%	40%	100%	250%	40%
4	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	15%	20%	20%	100%	500%	20%
Rata-rata capaian kinerja sasaran						283.33%	

- b. Dalam hubungan pekerjaan antara pekerja dan pengusaha terkadang terjadi perselisihan antara keduanya. Pemerintah berusaha memediasi dan menyelesaikan perselisihan secara bipartit. Dengan semakin banyak terbentuknya LKS Bipartit diharapkan perselisihan hubungan industrial cukup diselesaikan secara kekeluargaan dalam lembaga ini.

Peran serta aktif tiga unsur antara Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja dalam wadah LKS Tripartit akan memberikan kontribusi dalam menciptakan kondusifitas di bidang ketenagakerjaan. Besaran angka hasil survey KHL yang dilakukan oleh LKS Tripartit merupakan bahan pertimbangan bagi pimpinan daerah dalam menentukan besaran Upah Minimum Kota.

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatur masalah ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya mengenai hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, maka diaturlah dalam bentuk norma kerja yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Untuk menjamin pelaksanaan norma kerja yang berlaku perusahaan, secara aktif perusahaan wajib melakukan pelaporan dan aparat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan apabila terjadi pelanggaran norma kerja. Kegiatan Wajib lapor dan Pemeriksaan merupakan suatu wujud perlindungan terhadap pekerja atau pengusaha.

Program implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja berfungsi untuk meminimalisir kecelakaan kerja yang terjadi. Untuk menjamin Keselamatan kerja seorang wajib menggunakan alat pelindung dalam bekerja serta perusahaan menyediakan sarana kerja yang memenuhi uji kelayakan untuk digunakan dalam bekerja. Petugas pengawas ketenagakerjaan oleh aparat pemerintah melakukan pengujian secara berkala terhadap peralatan kerja yang digunakan di perusahaan.

Lembaga yang menaungi hubungan kerja antara Pekerja dan Pengusaha di perusahaan disebut LKS (Lembaga Kerja Sama) Bipartit. Lembaga ini adalah sebagai media dialog antara Pengusaha dan Pekerja (bisa diwakili oleh Serikat Pekerja) dalam membahas permasalahan bersama misalnya mengenai pembentukan Peraturan Perusahaan atau juga KKB (Kesepakatan Kerja Bersama). Pemerintah memfasilitasi pembentukan LKS Bipartit di perusahaan.

Dalam hal menentukan suatu kebijakan mengenai persoalan ketenagakerjaan dalam suatu daerah, LKS Tripartit yang terdiri dari unsur Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah melakukan suatu forum diskusi atau semacam kegiatan survey untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lembaga ini juga melakukan kegiatan sidang untuk menentukan usulan besaran Upah Minimum Kota untuk diusulkan ke tingkat provinsi.

Secara berkala perusahaan wajib melaporkan kondisi ketenagakerjaannya dengan mengisi formulir Wajib Lapor kepada Pemerintah melalui Dinas Terkait. Petugas Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan secara berkala ke perusahaan yang terdaftar perihal pelaksanaan norma kerja yang dijalankan di perusahaan untuk meminimalisir pelanggaran peraturan baik yang dilakukan oleh pihak Pengusaha (Perusahaan) atau pihak Pekerja di perusahaan.

Pengujian alat kerja di perusahaan ditujukan untuk menguji kelayakan peralatan yang digunakan di perusahaan guna menghindari akibat buruk yang dapat terjadi. Sasaran uji kelayakan adalah perusahaan yang menggunakan lift, eskalator, Alat Penangkal Petir, Genset, bejana tekan dll.

Capaian besaran pengujian peralatan perusahaan merupakan indikator kondisi penguji/pengawas ketenagakerjaan dan kesadaran pengusaha untuk menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Semakin besar capaiannya maka semakin banyak pengusaha yang berusaha menerapkan norma K3 dalam lingkungan kerjanya. Untuk besaran pengujian peralatan di perusahaan telah melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun keterbatasan personil penguji menjadi permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan ini. Oleh karena itu fasilitasi pemerintah kepada perusahaan yang membutuhkan pengujian peralatan sangat diperlukan, baik melalui pemberian stimulan biaya pelatihan bagi penguji, maupun biaya pengujian sehingga standar pelayanan minimal bisa tercapai.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 131.107.500,00 dari anggaran sebesar Rp. 156.534.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 83,76 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 283,33 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

18. Terwujudnya peran serta dan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja.

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peran serta dan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas kerja, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Capaian Kinerja 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Jumlah lembaga penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja.	13 unit	11 unit	84,62%	14	13	92,86%	13

- b. Lembaga-lembaga pelatihan dan ketrampilan swasta yang ada di tengah-tengah masyarakat melaksanakan program pendidikan pelatihan bagi masyarakat peminat program. Lembaga – lembaga ini biasanya mempunyai relasi dengan perusahaan-perusahaan pengguna tenaga kerja. Program pelatihan yang diadakan Lembaga Pelatihan Swasta dilanjutkan program penempatan. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Lembaga ini untuk peran aktifnya dalam meningkatkan kualitas produktivitas tenaga kerja.

19. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pekerja

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kesejahteraan pekerja, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Prosentase Pencapaian UMK terhadap KHL	95,39%	100%	98,03%	97,54%	99,50%	98,03%
2	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemda	0	Tidak ada	0%	0%	100%	0
3	Prosentase penurunan kasus-kasus ketenagakerjaan di Kota Magelang, baik kasus perselisihan hubungan industrial maupun kasus TKI	2%	90%	2%	Negative (dari 1 kasus menjadi 9 kasus)	82%	2%
Rata-rata capaian kinerja sasaran						93,83%	

- b. Tolok ukur kesejahteraan seorang pekerja, salah satunya adalah besaran upah yang diterimanya. Pemenuhan kebutuhan dasar seseorang dari tahun ke tahun mengalami perubahan seiring laju inflasi yang ada. Kondisi ini mengharuskan dilakukan suatu penyesuaian besaran UMK yang diterima oleh pekerja. Hasil survey KHL yang dilaksanakan diharapkan bisa menentukan besaran upah yang sesuai yang akan diterima oleh pekerja. Tolok ukur kesejahteraan yang bersifat imaterial adalah rasa puas, rasa aman serta kenyamanan seseorang dalam bekerja. Indikator utama peningkatan kesejahteraan seorang pekerja adalah besaran upah yang diterima. Laju inflasi menjadi suatu alasan logis apabila besaran upah perlu selalu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya. Besaran UMK yang diusulkan berpatokan pada besaran angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Pencapaian UMK terhadap KHL selalu diselaraskan untuk menjaga agar tidak terjadi ketimpangan. Melalui Sidang Dewan Pengupahan, yang anggotanya terdiri dari wakil pekerja, wakil pengusaha, Universitas, LSM dan Pemerintah mencari titik temu keseimbangan atas berbagai kepentingan bersama, diutamakan untuk peningkatan kesejahteraan bersama baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha.

Program-program peningkatan kesejahteraan pekerja seperti dengan terbentuknya koperasi karyawan di perusahaan, serta meminimalisir angka perselisihan terus dilakukan pihak pemerintah melalui disnakertransos kota magelang.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 894.660.100,00 dari anggaran sebesar Rp. 920.930.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 97,15 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 93,83 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

20. Terciptanya wirausaha baru

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terciptanya wirausaha baru, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah wirausaha baru	117 orang	25 orang	25	80	320%	25

- b. Kemandirian seseorang dalam berusaha salah satunya diwujudkan dalam kegiatan wirausaha. Semakin banyaknya wirausaha di suatu daerah terbukti mampu meningkatkan peluang kerja serta pertumbuhan ekonomi. Program penciptaan wirausaha baru diharapkan mampu mendongkrak program pengurangan pengangguran.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 267.225.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 279.616.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 95,56 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 320%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

21. Terlindunginya hak-hak keselamatan tenaga kerja

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terlindunginya hak-hak keselamatan tenaga kerja, sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Prosentase perusahaan yang telah menerapkan norma keselamatan dan perlindungan ketenagakerjaan	2,33%	2,50%	3,26%	6,20%	190,18%	3,73%
2	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	35%	45%	45%	70%	155,56%	50%
Rata-rata capaian kinerja sasaran						172.87%	

- b. Kampanye mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sangat penting dilakukan agar terbangun mindset di masyarakat pekerja tentang arti pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Program K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dicanangkan secara nasional oleh pemerintah setiap tahun di bulan Januari sebagai Bulan K3. Pada bulan ini dilaksanakan berbagai kegiatan untuk selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat akan arti pentingnya Keselamatan Kerja. Serangkaian kegiatannya meliputi Apel K3 dan Lomba K3 di perusahaan-perusahaan serta instansi pemerintah. Perusahaan wajib melaksanakan pengujian peralatan kerja. Penggunaan alat perlindungan kerja seperti Masker, Helm, wearpack secara langsung merupakan suatu tindakan preventif.

Pemilik usaha harus membantu tenaga kerjanya untuk ikutserta dalam asuransi tenaga kerja.

Bentuk perlindungan lainnya adalah dengan mengikutkan pekerja sebagai peserta Jamsostek, dimana Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial.

Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan 4 (empat) program perlindungan, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Realisasidana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 55.658.900,00 dari anggaran sebesar Rp. 61.094.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 91,10 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 172,87%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.